

DISKURSUS MERDEKA BELAJAR PERSPEKTIF PENDIDIKAN HUMANISME

Abdul Gani Jamora Nasution

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan Sumatera Utara, 20371
Email: abdulganijamoranasution@uinsu.ac.id

Abstrak

Konsep “Merdeka Belajar” yang didengungkan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi bahan acuan diskusi sekaligus menganalisis secara kritis mau dibawa kemana pendidikan Nasional kita. persoalan yang munculpun diketengahkan pada pembahasan 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Ujian Nasional (UN); 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Dari empat persoalan jika dielaborasi melalui pendekatan humanisme pendidikan, ada tiga persolan yang secara diseriisi dari praktik pendidikan Nasional. Pertama, tujuan pendidikan. Kedua, peserta didik, dan ketiga pendidik. Dari komponen rekomendasi Kemendikbud, secara prinsipil humanistik sejalan seirama dalam mendesain pendidikan.

Kata Kunci: Diskursus, Merdeka Belajar, Humanis

Pendahuluan

Persoalan yang sangat menarik diperbincangkan ketika istilah “Merdeka Belajar” dilontarkan menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim. Segenap akademisi pun memberikan komentar, ada yang sinis¹ dan tidak sedikit memberikan pujian.² Ini mengingatkan, bahwa aktivitas yang ada di dalam pendidikan dan pembelajaran, terus diminati dan dikaji. Targetnya idealnya adalah untuk membawa generasi masa mendatang unggul di antara negara-negara lainnya. Akan tetapi, konsepsi apapun yang dilontarkan perlu diuji secara akademik tentang landasan pikirnya. Bukan berarti, setiap apa yang dipikirkan langsung diterapkan. Bahkan, setelah diterapkan pun

¹ Artikel yang ditulis Wiranto B. Manalu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Jambi dengan judul KONSEP “MERDEKA BELAJAR”: KEMANA ARAH PENDIDIKAN INDONESIA? <https://www.unja.ac.id/2020/01/02/konsep-merdeka-belajar-kemana-arrah-pendidikan-indonesia/>

² Artikel yang ditulis R. Suyato Kusumaryono, Staf Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian, Setditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud dengan judul artikel Merdeka Belajar, <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>, tulisan Bayumie Syukri dengan judul Menakar Konsep Merdeka Belajar, <https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/> dan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (API), Satryo Brodjonegoro memberikan penilaian positif terlebih kondisi pandemi sat ini, <https://www.antarane.com/berita/1608238/aipi-konsep-merdeka-belajar-tepat-untuk-kondisi-pendidikan-saat-ini>

haruslah dievaluasi. Agar jangan terjebak pada anomali dan bahkan miskonsepsi dalam skala pendidikan nasional.

Berbicara pendidikan skala nasional, tentu merujuk apa yang tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dari tujuan pendidikan tersebut, kompleksitas yang ditargetkan sungguh luar biasa. Inilah kemudian tidak heran para pembuat kebijakan berlandaskan untuk terus memikirkan ulang tentang praktik pendidikan dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Terlepas dari berbagai faktor, misalnya kompetisi global pendidikan nasional jauh di bawah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya dan khazanah lokalitas nusantara yang dimiliki, memikirkan ulang tentang praktik pendidikan dan pembelajaran memang sebuah keharusan.

Artikel sederhana ini, mencoba memberikan tawaran untuk didiskusikan lebih lanjut tentang konsepsi Merdeka Belajar dalam perspektif pendidikan humanisme. Kajian ini tentu untuk kekayaan berpikir, menawarkan sebuah wacana dan paling penting *counter* konsepsi anomali tentang pendidikan itu sendiri. Juga, dapat dijadikan rujukan sebuah bantahan terhadap “gatalnya” pikiran yang sudah bersarang bahwa ganti menteri ganti kebijakan tentang pendidikan.

Merdeka Belajar *ala* Kemendikbud

Istilah “Merdeka Belajar” dapat dikatakan muncul dari pidato Kemendikbud dalam rangka memperingati hari guru nasional. Untuk melihat konten pidato tersebut, penulis mencantumkan poin pentingnya saja:³

“Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak

³ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato-mendikbud-nadiem-makarim-pada-upacara-bendera-peringatan-hari-guru-nasional-2019>

murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan.

Anda frustrasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambil langkah pertama.

Pidato yang sangat singkat jika dibandingkan dengan orasi yang sebelumnya tentang pendidikan, memberikan kesan yang cukup faktual. Bahasa yang mudah dipahami dan dirasakan keresahan oleh guru tentang administrasi yang dapat membelenggu kreativitas guru. Tidak berlebihan jika penulis mengambil poin tentang “eksistensi guru” dalam mewacanakan perubahan yang unggul dalam pendidikan Nasional. Keberadaan Guru yang menjadi pintu masuk dalam akses kelancaran pendidikan nasional, membawa pada pembahasan rekomendasi yang diuraikan kemendikbud tentang Merdeka Belajar pada empat pembahasan.⁴ Pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Kedua, Ujian Nasional (UN). Ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Keempat, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

USBN 2020. Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 2, ayat 1; menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5, ayat 1, bahwa; bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Ditambahkan pula pada penjelasan Pasal 6, ayat 2, bahwa; untuk

⁴ <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>

kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian jika melihat isi Permendikbud tersebut menunjukkan, bahwa Guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa.

2. Ujian Nasional (UN).

Kedua; UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu (Permendikbud No. 43 Tahun 2019). Terkait untuk pelaksanaan UN tahun 2020, sebagaimana disampaikan Mendikbud merupakan kegiatan UN yang terakhir kalinya, selanjutnya ditahun 2021 mendatang UN akan digantikan dengan istilah lain yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter. Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Adapun untuk teknis pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan ditengah jenjang sekolah. Misalnya di kelas 4, 8, 11, dengan maksud dapat mendorong guru dan sekolah untuk memetakan kondisi pembelajaran, serta mengevaluasi sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran. Dengan kata lain, agar bisa diperbaiki kalau ada hal yang belum tercapai. Sebagai catatan hasil ujian ini tidak digunakan sebagai tolok ukur seleksi siswa kejenjang berikutnya. Adapun untuk standarisasi ujian, arah kebijakan ini telah mengacu pada level internasional, mengikuti tolok ukur penilain yang termuat dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, tetapi penuh dengan kearifan lokal (Media Indonesia, 12/12/2019). Untuk kompetensi PISA lebih difokuskan pada penilaian kemampuan membaca, matematika, dan sains, yang

diberlakukan pada negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), sedangkan untuk kompetensi TIMSS lebih menekankan pada penilaian kemampuan matematika, dan sains, sebagai indikator kualitas pendidikan, yang tergabung dalam wadah *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*, berpusat di Boston, Amerika Serikat (Koran Tempo, 12/12/2019).

Terkait Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, dimaksudkan supaya setiap sekolah bisa menentukan model pembelajaran yang lebih cocok untuk murid-murid, daerah, dan kebutuhan pembelajaran mereka, serta Asesmen Kompetensi Minimum tidak sekaku UN, seperti yang disampaikan Dirjen GTK Supriano (<https://www.alinea.id/nasional/merdeka-belajar>). Selanjutnya untuk aspek kognitif Asesmen Kompetensi Minimum, menurut Mendikbud materinya dibagi dalam dua bagian: (1) Literasi; bukan hanya kemampuan untuk membaca, tapi juga kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut; (2) Numerasi; berupa kemampuan menganalisa, menggunakan angka-angka. Jadi ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan penguasaan konten, atau materi. Namun ini didasarkan kepada kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar, apapun mata pelajarannya (Media Indonesia, 12/12/2019).

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Ketiga; Dalam hal RPP, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019, tentang Penyederhanaan RPP, isinya meliputi: (1) penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa; (2) Dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assesment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap; dan (3) Sekolah, Kelompok Guru Mata Pelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Adapun RPP yang telah dibuat dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana maksud pada

angka 1, 2, dan 3. Bila dicermati dari keseluruhan isi surat edaran mendikbud tersebut, dapat dimaknai bahwa penyusunannya lebih disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, sebab gurulah yang mengetahui kebutuhan siswa didiknya dan kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa di daerahnya, karena karakter dan kebutuhan siswa di masing-masing daerah bisa berbeda. Untuk penulisan RPP-nya supaya lebih efisiensi dan efektif, cukup dibuat ringkas bisa dalam satu halaman, sehingga guru tidak terbebani oleh masalah administrasi yang rijit. Diharapkan melalui kebebasan menyusun RPP kepada guru, siswa akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis, dengan model pembelajaran yang tidak kaku.

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Keempat; Untuk PPDB, berdasarkan Permendikbud baru Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11, dalam persentase pembagiannya meliputi: (1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali lima persen; dan (4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua /wali (0-30 persen). Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting: (1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi, semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan (2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan demikian untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Secara umum sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik, karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik.

Supaya lebih memahami konsep merdeka belajar sebagaimana telah dikupas tuntas di atas, ada baiknya konsep Merdeka Belajar juga dikaji secara teoritis

berdasarkan terminologi arti kata “Merdeka” dan konsep “Belajar” itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Merdeka memiliki tiga pengertian: (1) bebas (dari perhambatan, penjajahan dan sebagainya), berdiri sendiri; (2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan; (3) tidak terikat, tidak oleh tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Adapun konsep “Belajar” menurut Sagala (2006), dapat dipahami sebagai usaha atau berlatih supaya mendapatkan suatu kepandaian. Ditambahkan pula menurut Sudjana (2013), belajar bukan semata kegiatan menghafal dan bukan mengingat. Belajar adalah; (1) suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, dapat ditunjukkan seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan, dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada ada individu; (2) belajar adalah proses aktif, proses berbuat melalui berbagai pengalaman; (3) belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu; (4) Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan; dan (5) Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. Jadi apabila kita berbicara tentang belajar, maka prinsipnya berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang.

Hal lain yang menariknya lagi bahwa semangat Program Merdeka Belajar ternyata jika dihubungkan dengan gagasan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menunjukkan adanya benang merah keterkaitannya, antara lain: (1) diantara salah satu dari lima dasar pendidikan mengajarkan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan; (2) kemerdekaan diri harus diartikan swadisiplin atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemerdekaan harus juga menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan selaras dengan masyarakat (dalam Afifuddin, 2007); dan (3) Implementasinya dalam hal pendidikan dan pengajaran, bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan (<https://www.finansialku.com/hari-pendidikan-nasional-ki-hajar-dewantara/>).

Dengan demikian ternyata banyak hal tentang dasar-dasar pendidikan yang diajarkan beliau masih relevan dengan kondisi kekinian termasuk konsep Merdeka Belajar.

Dari apa yang telah dialami konsep Merdeka Belajar dilihat dari maksud tujuan, isi, dan teorinya, serta diskusi dengan pakar serta praktisi pendidikan, maka sebagai catatan penulis terhadap program Merdeka Belajar, penilaiannya antara lain: Pertama, secara yuridis; pentingnya landasan hukum untuk menguatkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, khusus pada wacana mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter ditahun 2021, dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang intinya masih mengatur terkait pelaksanaan UN, beserta nomenklaturnya; Kedua, terkait Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter; (a) Meskipun ini masih dalam proses pematangan, karena nantinya guru yang bakal melaksanakannya, penting untuk adanya panduan dalam memahami betul apa yang dimaksud Asesmen Kompetensi Minimum, serta kejelasan teknis survei karakter; dan (b) termasuk pula panduan untuk soal literasi dan numerasi nanti; Ketiga, terkait RPP; (a) disederhanakannya RPP jelas akan mengurangi beban administrasi guru, namun dengan memberikan kebebasan kepada guru dalam menyusun RPP dirasa sangat riskan, mengingat guru selama ini sangat bergantung pada petunjuk teknis, disamping guru-guru selama ini umumnya belum maksimal membuat RPP secara mandiri, lebih pada cypaste; dan (b) mempertimbangkan bahwa kondisi kompetensi guru di daerah yang masih banyak ketimpangan, perlu dilakukan pelatihan yang terus-menerus termasuk didalamnya menyusun RPP. Tentu kita menyambut baik, mengapresiasi, dan optimis apa yang digagas oleh Mendikbud Nadiem Makarim yang telah berupaya keras untuk melakukan berbagai terobosan inovasi pendidikan sebagai reformasi guna majunya pendidikan di tanah air, karena tidak mudah dalam menciptakan sebuah formula dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Sekarang tinggal bagaimana meminimalisir dampak dari kebijakan tersebut. Kita berharap dengan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar sebagai program baru bagi arah pembelajaran ke depan tidaklah menjadi hal berbenturan, bahkan sebaliknya menjadi sebuah kebijakan yang berkorelasi dengan program-program pendidikan sebelumnya, seperti; Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Sehat, Sekolah Bebas dari Perundungan (bully), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Penguatan Pendidikan Karakter seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan

Pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Kiranya bisa disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Merdeka Belajar merupakan sebuah Grand design pendidikan nasional yang bertujuan untuk perubahan secara fundamental dalam mengakselerasi lahirnya SDM Indonesia Unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Mengingat pada kondisi sekarang ini begitu mendesak tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena salah satu targetnya adalah guna mempersiapkan Generasi Emas 2045, menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, dengan capaian tingkat kesejahteraan, keharmonisan, dan kemartabatan yang tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Akhirnya mari kita jadikan kebijakan program Merdeka Belajar sebagai tonggak bagi majunya pendidikan di Indonesia, sekaligus bagi majunya bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang unggul di berbagai bidang.

Ada yang menarik ungkapan dari personalia Kemendikbud Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ade Erlangga, Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia suasana yang happy, bahagia bagi peserta didik maupun para guru. Makanya tag-nya merdeka belajar. Adapun yang melatarbelakangi diantaranya banyak keluhan para orangtua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu Ditambahkan pula bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. "Konsepnya, mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum, menjadi penilaian mereka sendiri, seperti disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Supriano.

Sejauh apapun istilah yang dilontarkan tentu publik akan bertanya-tanya tentang "kemujaraban" sebuah konsep. Sekaligus akan diuji melalui waktu yang berjalan. Jika, konsep yang digunakan terbukti untuk beberapa tahun dan puluhan tahun di masa mendatang, maka akan melepaskan dari belenggu politis semata.

Pendidikan dalam Filsafat Humanisme

Pendidikan humanisme adalah usaha terpadu untuk memanusiakan manusia muda sehingga mampu membentuk karakter dan terwujudnya peserta didik yang mempunyai keutamaan – keutamaan, jadi pendidikan humanisme adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia agar mereka lebih manusiawi.⁵ Menurut Baharudin dan Moh. Makin, pendidikan Humanisme adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai ciptaan tuhan yang mempunyai fitrah-fitrah tertentu. Karena sebagai makhluk pribadi mereka mempunyai kekuatan konstruktif dan destruktif, sebagai makhluk sosial mereka memiliki kewajiban yang harus dikerjakan sekaligus hak-hak yang harus mereka dapatkan. Menurut Muhammad Azzet pendidikan yang bersifat Humanisme adalah pendidikan yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan sehingga mereka dapat menjadi manusia yang lebih tercerahkan. Karena menurut beliau pendidikan yang menitik beratkan pada proses untuk membangun kesadaran itu lebih penting dibandingkan dengan pendidikan yang lebih berorientasi pada menghafal teori-teori pengetahuan. Keseimbangan antara potensi yang dimiliki manusia dengan lingkungan yang kondusif merupakan kunci keberhasilan dari pendidikan yang dijalani manusia. Karena walaupun manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan mencintai kesucian, namun tanpa dukungan dari lingkungan maka potensi tersebut akan berubah menjadi potensi yang negatif. Oleh sebab itu untuk menciptakan pendidikan Humanisme yang memberikan hasil maksimal harus memperhatikan keseimbangan antara dua aspek tersebut yaitu aspek internal dan eksternal dari manusia.⁶

Psikolog asal Jerman William Stern⁷ (1871 – 1938), mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor ini penting diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses perkembangan manusia serta pendidikannya. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat pada ajaran Islam karena dalam ajaran Islam terdapat aspek yang ketiga yaitu teosentris,

⁵ Bambang Sugiharto, *Humanisme dan Humaniora*, hal. 342.

⁶ Dalam al-Qur'an dijelaskan "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri" QS. Al-Rad [13] : 11).

⁷ Baharuddin, dan Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA GROUP, 2007), hlm. 43.

jadi dalam Islam ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam kehidupan manusia, begitu pula dalam pendidikan, yaitu aspek internal, eksternal dan aspek teosentris yaitu kehendak Allah yang maha mencipta. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi diterangkan tentang keterkaitan antara faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi perkembangan manusia

Fokus Pendidikan Humanistik Perspektif Islam

Dalam membahas prinsip pendidikan humanistik, filsafat pendidikan Islam sendiri dirujuk pada pembahasan mengenai tujuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik sebab dengan ketiganya itu akan dapat diketahui apa kehendak pendidikan humanistik atas manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, Segala sesuatu memiliki tujuan begitu pula pendidikan, Pendidikan yang manusiawi (*At-tarbiyah Al-khulqiyyah*) adalah ruh pendidikan Islam, dan mencapai manusia sempurna adalah tujuan hakiki dari pendidikan.⁸Namun kadar mencapai manusia sempurna ini memiliki pengertian yang berbeda dalam pandangan para tokoh pendidikan, di antaranya :

1. Pendidikan bertugas memberikan yang diperlukan jasad dan ruh apa-apa yang menjadikannya lebih baik dan sempurna. (Plato)
2. Pendidikan adalah jalan yang membukakan akal bagi akal yang lain dan membukakan hati bagi hati yang lain. (Jules Simon)
3. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan akal untuk memberdayakan ilmu, ibarat mempersiapkan bumi sebagai ladang tanaman dan padi. (Aristoteles).
4. Pendidikan yang sempurna adalah yang menciptakan manusia-manusia yang cakap dalam beramal/ professional. (John Milton)
5. Pendidikan membersihkan kekuatan tabiat anak, untuk mencapai kekuatan hidup yang sehat dan berbahagia. (Sully)
6. Tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia sempurna Immanuel Kant)
7. Pendidikan mempersiapkan individu untuk mampu membantu yang lain. (W.T. Harees)

⁸ Muhammad Athiyah Al-abrosiy, *At-tarbiyah Al-ilamiyyah wa Falsafatuha* (Mesir: Isa Albabi Al-khalabiy, 1975) Shokhifah 22.

8. Pendidikan pada awalnya untuk mempersiapkan kebahagiaan individu, selanjutnya untuk mempersiapkan kebahagiaan orang lain. (James Mill)⁹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan ditujukan untuk mempersiapkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia, mencintai tanah air, kuat badannya, sempurna penciptaannya, cerdas berfikir, melembutkan perasaan, cakap dalam beramal (professional), mau membantu sesama, santun dalam tulisan dan perkataannya. Jika hal ini mampu diwujudkan maka akan tercapai hakikat tujuan pendidikan dan pembelajaran. Imam al-Ghazali sendiri berpendapat “tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk kewibawaan dan kharisma, maka agar para pelajar tidak menujukan tujuannya pada wibawa, kharisma dan harta. dan demikian itu tidak dikecualikan dalam pendidikan yang manusiawi.” Namun sebagai kesimpulannya tujuan dasar pendidikan Islam termuat dalam satu kata “kesempurnaan”.¹⁰

Kedua, Pendidik (guru) Salah satu yang menjadi unsur penting pendidikan adalah pendidik, dimana pendidik adalah pemegang tampuk utama keberhasilan sebuah pembelajaran, sebab guru yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik dan mengerti apa yang peserta didik butuhkan. Oleh karenanya demi mencapai keberhasilan atau paling tidak memenuhi standar ideal pendidik yang berhasil mestilah ditetapkan standar yang tepat. Salah satu pendidik yang berhasil dalam sejarah dan patut dijadikan standar ukur adalah rasulullah saw. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT adalah seorang pendidik sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Jumu'ah ayat dua dan surat al-Baqarah ayat 151. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa misi dan tugas Nabi sebagai seorang Rasul adalah membacakan ayat-ayat-Nya (tilawah), mensucikan jiwa (tazkiyah) yang diartikan dengan mendidik, serta mengajarkan al-Kitab dan al-hikmah (ta'lim), yang berarti proses mengajar untuk membekali seseorang dengan berbagai ilmu pengetahuan, baik yang terkait dengan alam nyata maupun metafisika, yang tetap bersandar pada al-Qur'an an as-sunnah. Tujuan pembacaan, penyucian dan pengajaran tersebut adalah pengabdian kepada Allah, sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Ketiga tugas tersebut dapat diidentikkan dengan fungsi pendidikan dan pengajaran yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik. Jadi, pendidikan yang

⁹ Muhammad Athiyah Al-Abrosy,, hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Athiyyah Al-Abrosiy,, hlm. 22.

baik dan ideal harus mengandung ketiga unsur tersebut. Rasulullah dengan cara di atas telah sukses mendidik para sahabatnya menjadi masyarakat yang berbudi tinggi dan mulia, dari masyarakat jahiliyah menjadi bangsa yang berbudaya, bermoral, serta berpengetahuan. Jadi, pendidikan tidak hanya menekankan pada orientasi intelektualitas semata, tetapi juga menekankan pada pembentukan kepribadian yang utuh, yang tercerminkan dalam aktifitas *tilawah*, *tazkiyah*, dan *ta'lim*. Pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, sehingga mampu mengemban tugas sebagai *'abdullah* dan *khalifatullah* adalah tujuan pendidikan Qur'ani.¹¹

Ketiga, Peserta didik. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang humanis perlu kiranya mengetahui filsafat tentang manusia terlebih dahulu, karena dari dasar ini akan diketahui kemana tujuan pendidikan hendak diarahkan dan manusia seperti apa yang diinginkan oleh pendidikan. Ali Syari'ati, dalam penelitiannya tentang manusia memperjelas asas-asas humanisme manusia, menurutnya manusia adalah :

1. Makhluk asli, artinya ia mempunyai substansi yang mandiri di antara makhluk lainnya, dan memiliki esensi genera yang mulia.
2. Makhluk yang memiliki kehendak bebas, dan ini merupakan kekuatan paling besar yang luar biasa dan tidak bisa ditafsirkan.
3. Makhluk yang sadar berfikir. Dan ini merupakan karakteristik meojolnya. Manusia mampu memahami realitas alam luar dengan kekuatan berfikir.
4. Makhluk yang sadar akan dirinya sendiri, dia adalah makhluk hidup satu-satunya yang memiliki pengetahuan budaya dalam nisbatnya dengan dirinya.
5. Makhluk kreatif. Kreativitas yang menyatu dengan perbuatannya ini menyebabkan manusia mampu menjadikan dirinya makhluk yang sempurna dihadapan alam semesta dan dihadapan Tuhan.
6. Makhluk yang memiliki cita-cita dan merindukan sesuatu yang ideal.
7. Makhluk moral. Tibalah pada bagan ini pada bagian penting terhadap nilai-nilai (*values*).¹²

11

¹² Ali Syari'ati, *Humanisme Antara Islam dan Madzhab Barat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996) hlm.47-49.

Dasar inilah perumusan tujuan pendidikan dan bagaimana membentuk peserta didik yang humanis dapat diperkirakan. Maka dengan hal ini dapat diambil sebuah kesimpulan singkat bahwa pendidikan humanistik adalah pendidikan yang berupaya untuk menyadarkan manusia akan hakikat potensi dan kemampuan luar biasa yang dimiliki tiap manusia, dimana dengan potensi itu manusia dapat berbuat dan menjadi apapun yang ia kehendaki, pemahaman seperti inilah yang akan berusaha ditanamkan pada setiap peserta didik agar mereka dapat memaksimalkan potensi dirinya.

Penutup

Humanisme dalam membidik tujuan intinya sudah barang tentu akan melibatkan sisi kemanusiaan sebagai hakikatnya sendiri, kemanapun tujuan dan arah sebuah tujuan yang mengatasnamakan humanisme akan menumpukan langkah dan cara pandangnya pada apa yang akan membuahkan hal baik bagi manusia, apapun yang mengenai pembelaan hak dan harkat kemanusiaan akan diperjuangkan oleh faham humanisme ini. Tapi demikian tidak setiap yang menghasilkan kebaikan bagi manusia selalu baik bagi ajaran Islam, seperti mengantisipasi perzinahan dengan nikah mut'ah, tentu hal itu tidak bisa dibenarkan oleh agama. Oleh karenanya harus ditentukan prinsip-prinsip untuk menstandarkan tujuan dan orientasi humanisme dalam pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Abrosiy, Muhammad Athiyyah At-Tarbiyah Al-Ilamiyyah wa Falsafatuha, Mesir: Isa Albabi Al-khalabiy, 1975.
al-Qur'an al-Karim
Al-Syaibany, Omar Muhammad Al-Toumy. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Azizy, Qodri. *Pendidikan Untuk Menbangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Baharuddin & Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA GROUP, 2007.

<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>

<https://www.antaraneews.com/berita/1608238/aipi-konsep-merdeka-belajar-tepat-untuk-kondisi-pendidikan-saat-ini>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato-mendikbud-nadiem-makarim-pada-upacara-bendera-peringatan-hari-guru-nasional-2019>

Kusumaryono, R. Suyato, Merdeka Belajar, <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>, Syukri, Bayumie, Menakar Konsep Merdeka Belajar, <https://intens.news/menakar-konsep-merdeka-belajar/>

Manalu, Wiranto B. KONSEP “MERDEKA BELAJAR”: KEMANA ARAH PENDIDIKAN INDONESIA? <https://www.unja.ac.id/2020/01/02/konsep-merdeka-belajar-kemana-arrah-pendidikan-indonesia/>

Mas’ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, Yogyakarta, Gama Media, 2002.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 2.

Syari’ati, Ali *Humanisme Antara Islam dan Madzhab Barat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Zubaedi, *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.